

ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Daoud JOESOEFF

Berkat tulisan-tulisan dan penerangan yang selama ini dilakukan secara intensif, kiranya dapat dikatakan bahwa setiap orang mengetahui bahwa salah satu faktor penting yang menentukan jalannya pembangunan ekonomi adalah "modal". Sayangnya di sini modal seringkali ditanggapi dalam artian materil, baik uang maupun fisik. Bukankah setiap hari orang mendengar pernyataan betapa kredit diperlukan bagi dunia bisnis dalam jumlah yang semakin lama semakin besar. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari orang melihat betapa meluas-tidaknya sesuatu aktifitas produktif erat hubungannya dengan besar-kecilnya tersedia peralatan masinal, dari "hardware" yang paling sederhana seperti alat bubut sampai rangkaian mesin-motor-energi yang sebagai keseluruhan merupakan satu pabrik.

Kiranya kurang disadari bahwa ada modal lain yang tidak kalah pentingnya dari modal materil tersebut di atas bagi jalannya pembangunan ekonomi, yaitu "kebudayaan". Bila dipandang dari sudut warga masyarakat perseorangan, kebudayaan dapat diartikan sebagai perkembangan kesanggupan mental, termasuk di dalamnya keseluruhan elemen artistik, sastra lisan dan tulisan serta pengetahuan ilmiah yang membantu perkembangan tersebut. Berhubung dengan ini, bila dipandang dari sudut masyarakat sebagai keseluruhan, kebudayaan adalah modal spirituil dan intelektual yang, di satu pihak, tumbuh di dalam perjalanan masyarakat dan, di lain pihak, mendorong perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sini kiranya menjadi jelas betapa diperlukannya satu politik kebudayaan yang aktif, dalam artian politik yang tidak hanya ditujukan ke arah penggunaan, walaupun tidak pemerasan, secara maksimum atas modal-kebudayaan demi mendapatkan daripadanya sumbangan yang sebesar-besarnya kepada pembangunan ekonomi, tetapi juga satu politik yang ditujukan ke arah pengembangan kebudayaan atau sesedikitnya guna mencegah supaya modal-kebudayaan ini tidak menyusut, secara perlahan-lahan tetapi pasti.

Salah satu cara yang terbukti telah menggerogoti kebudayaan adalah mekanisme di mana peranan manusia semakin lama semakin direduksi hanya sebagai konsumen dan penonton berhubung kekuasaan mesin-mesin dibiarkan semakin lama semakin besar di dalam proses pembangunan ekonomi. Bila demikian salah satu bentuk politik kebudayaan yang aktif guna melawan mekanisme yang semata-mata ditujukan ke arah menaikkan G.N.P. "at all costs" adalah pemberian training massal ke arah penguasaan teknologi dan industrial arts. Artinya menggunakan pengetahuan ilmiah di dalam usaha memberikan efektifitas yang tinggi kepada tenaga manusia. Dengan perkataan lain, satu politik kebudayaan yang bertujuan mempercepat evolusi suatu corak kehidupan dan satu sistem ekonomi di mana prioritas diberikan kepada perlindungan, pengembangan dan penggunaan yang maksimum terhadap satu-satunya sumber (resource) yang praktis dimiliki oleh setiap warga masyarakat, yaitu tenaga ataupun energi manusia. Jadi satu politik yang membantu warga masyarakat untuk dapat menarik keberuntungan yang sebesar-besarnya dari tenaga yang diberikan alam kepadanya, yang membantunya untuk menjadi bangga atas hidupnya berhubung ia adalah produsen dan dapat berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembangunan ekonomi masyarakatnya.

Politik kebudayaan yang aktif seperti diuraikan di atas secara tidak langsung membantu memecahkan masalah sosial dari pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan kita adalah tidak hanya menciptakan satu masyarakat yang makmur baik materiil dan spirituil tetapi juga satu masyarakat yang adil. Bila dibawa ke bidang ekonomi, azas keadilan ini sering diartikan semata-mata sebagai keharusan membagi pendapatan secara merata. Dengan tidak ke luar dari bidang ekonomi, azas keadilan kiranya juga dapat dilaksanakan secara lain, yaitu dengan jalan menggunakan sumber yang praktis dimiliki oleh setiap warga, dalam hal ini energi manusia, seperti disebut di atas. Menang proses produksi modern tidak dapat menggunakan energi manusia begitu saja. Maka itu energi itu perlu dibina agar dapat memenuhi persyaratan elementer yang diminta melalui training yang praktis terbuka bagi setiap orang yang memerlukannya. Usaha mencapai azas keadilan dengan jalan seperti ini kami kira lebih positif dari usaha pembagian pendapatan yang lebih merata karena ia lebih bersifat mendidik dan lebih melayani arti martabat dan harga diri manusia, yaitu makhluk yang sekaligus merupakan pendukung dan pengolah kebudayaan.

Berhubung politik kebudayaan yang aktif seperti disebut di atas mau tidak mau menyinggung aspek sosial dari pembangunan ekonomi maka sampai tingkat tertentu diperlukan pula adanya satu politik sosial yang relevant. Tidak boleh dilupakan bahwa training massal ke arah penguasaan teknologi dan industrial arts tidak hanya berakibat menaikkan persediaan modal manusia di dalam ekonomi kita. Ia juga berakibat memperpanjang masa-kesanggupan-kerja rata-rata (average working lifespan) warga masyarakat yang pasti menimbulkan persoalan baru di bidang penggantian tenaga atau di bidang penempatan tenaga baru, menambah dan memperbesar masalah yang sudah ada sebagai akibat perpanjangan masa-hidup rata-rata (average lifespan) karena kemajuan di bidang hygienis. Selain dari ini, politik sosial yang aktif juga diperlukan karena satu hal yang fundamental. Yaitu, dengan politik training-teknologis massal tersebut, kita menciptakan satu jenis pekerja baru, yaitu pekerja otak (knowledge worker), dengan perkataan lain, lambat tetapi pasti, kita menciptakan suatu masyarakat-otak (knowledge society). Berhubung dengan ini kita, melalui satu politik sosial yang aktif, harus sudah bersiap-siap untuk dapat mengatur masyarakat yang seperti itu, yang pasti lain sekali dari cara mengatur satu masyarakat tradisional seperti selama ini telah kita kenal dengan baik. Kiranya perlu disadari bahwa pekerja-otak, berbeda halnya dengan pekerja-tangan, tidak hanya puas dengan pekerjaan yang memberikan nafkah-hidup. Mereka perlu dimotivir secara lain, mereka tidak menerima begitu saja dimasuk-masukkan ke dalam kotak-kotak hierarkhis dari organisasi bentukan masa-lalu. Hal ini berarti bahwa kita harus dapat memikirkan bentuk-bentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan yang baru, bentuk hubungan horizontal dan vertikal yang baru, yang sesuai dengan type baru dari individu yang membentuk masyarakat masa depan itu.

Bila pemasalahannya memang demikian maka para penguasa, terutama para pejabat yang diberi wewenang untuk merumuskan rencana pembangunan, di dalam merumuskan politik sosial yang aktif harus sesedikitnya meminta sumbangan pikiran dari ahli sosiologi, politik dan kebudayaan. Menganggap diri serba-tahu dan karenanya menutup mata dan telinga terhadap analisa dan pendapat orang lain, semata-mata karena kenyataan bahwa ia telah diberi wewenang tersebut, pasti akan meratakan jalan bagi satu kegaduhan sosial dan politik.

